

Radikalisasi Pluralisme sebagai Usaha Pengarutamaan Politik Agonistik

*Ignasius Jaques Juru**

Abstract

Current political space with its variety on identities has resulted on the difference to the political interests. This situation requires the rethinking of new form of political pluralism. Moreover, the idea to rethinking new form of political pluralism has been raised, there is radicalization of pluralism through agonistic politics. This idea need to be flourished in order to create democratization in society. This article discusses how political activities among the plurality of political identities. Relations constructed based on the relation of politics where the antagonism is present as a political necessity.

Kata-kata kunci:

Pluralisme; politik agonistik; hegemoni; dan demokrasi.

Pendahuluan

Menjadi Indonesia adalah *being politic*. Setiap jejak ke-Indonesiaan pun menjelaskan kejamakan kita sebagai identitas politik. Dengan demikian fakta ontologis itu pun terpikirkan dalam kebhinekaan. Ketidaktunggalan bangsa ini merupakan wajah historis yang tidak mungkin dihapus. Sejak kita membayangkan satu bangsa yang di

* *Ignasius Jaques Juru* adalah alumni S1 Fisipol UGM Jurusan Politik dan Pemerintahan. Ia dapat dihubungi melalui email juru.rian@gmail.com.

dalamnya diisi oleh keragaman identitas, maka sejak itu pula kita ada dalam suatu konstruksi historis mengenai identitas ke-Indonesia-an kita.

Sejauh ini, keberagaman identitas dimaknai dalam “mantera” ke-Indonesia-an yakni Bhineka Tunggal Ika. Adagium ini merujuk pada suatu kesatuan politis dan kultural dari keragaman. Pelacakan mundur menjelaskan adagium ini digunakan oleh Patih Gajah Mada ketika melakukan usaha penyatuan politik di bawah kontrol kekuasaan Majapahit. Cerita ini mengilhami spirit keberagaman dan kesatuan bangsa Indonesia. Setidaknya inilah yang diajarkan dalam teks-teks kurikulum pendidikan kita, khususnya di masa Orde Baru. Kita juga diajari kebijakan kategori politik kebudayaan oleh rezim Orde Baru seperti, pembagian kebudayaan dalam dua kategori yakni kebudayaan nasional dan kebudayaan daerah (Simanjuntak, 2000: 1).

Pada satu sisi, budaya nasional dianggap sebagai kebudayaan yang diterima sebagai bagian integral dari subjek politik Indonesia sekaligus penanda integrasi keberagaman identitas dan di sisi lain kebudayaan daerah hanya dihargai sebagai mozaik yang memberi warna keindahan dalam montase keindonesian tanpa mempertanyakan eksistensi politik di dalam lokalitasnya. Eksklusivitas tentunya sesuatu yang tidak terhindarkan dan dalam konteks ini kita melihat bentuk halus subordinasi kebudayaan di Indonesia.

Dhakidae dalam Anderson (2002: x) mencoba membongkar ruang politik Majapahit yang sering menjadi keyakinan umum kita khususnya berkaitan dengan ide kebhinekaan. Majapahit sebagai contoh yang sering kita pakai, dalam dirinya meninggalkan jejak fakta yang menegasi geliat perbedaan. Berdasarkan Nagarakertagama, bila ada pelanggaran terhadap perintah maka mereka akan didatangi pasukan ekspedisi dan ditiadakan sama sekali oleh tindakan pasukan keamanan *jaladi mantry* yang tak terbilang jumlahnya serta masyhur namanya. Tindakan mereka ini dalam bahasa kuno disebut sebagai *wicirna sahana*, diterjemahkan menjadi “dikirim ke lembah sirna”. Jika Dhakidae membaca persoalan ini sebagai bagian dari problematisasi kebangsaan, maka penulis melihat ini sebagai refleksi gejala identitas politik dalam rentang historis tertentu. Penentangan tidak hanya dibaca sebagai pembangkangan tetapi harus dilihat sebagai gejala artikulatif dari perbedaan politis. Di sinilah keragaman dalam ide kebhinekaan perlu dipikirkan lagi.

Fakta politis Majapahit—terlepas dari retakan sejarah yang terjadi dan membentuk ke-Indonesia-an—seolah berada dalam titik pengulangan saat tegaknya rezim Orde Baru. Kita mengenal berbagai gerakan separatis yang muncul dari berbagai daerah, dan berusaha ditekan dengan kebijakan DOM (Daerah Operasi Militer), hampir sama dengan kebijakan *wicirna sahana*. Pada sisi lain, politik hegemonik dengan memaksakan asas tunggal Pancasila mewujudkan melalui berbagai kebijakan, seperti penataran, pelatihan, dan normalisasi. Lembaga pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi kebanjiran berbagai mata pelajaran dengan beragam nama tetapi ada satu benang kuning yang mengikat mereka semua: ketundukan warga negara di bawah duli Suharto (Tomagola, 2006: 7).

Dalam pembacaan Foucauldian, hal ini merupakan bentuk-bentuk pendisiplinan melalui aturan-aturan yang dipahami sebagai teknologi kekuasaan. Suatu rasionalitas kekuasaan bekerja pada medan diskursifnya untuk menciptakan dan memelihara subjek kekuasaannya, atau subjek yang menjadi "*dociles bodies*" (Agamben, 1995: 2). Inilah gerak neo-fasisme yang mendambakan suatu ketunggalan yang solid di bawah satu rezim dan mengabaikan keragaman ekspresi politik yang menjadi ruang bagi bekerjanya demokrasi.

Normalisasi-normalisasi pada akhirnya memunculkan denormalisasi. Yakni suatu gerak *psyce*, oleh Butler hal ini dipahami sebagai *what resists the regularization of normalizing discourses* (Butler, 1997:86). Kita juga dapat merujuk pada terminologi Laclau dan Mouffe yakni, *dislocation* (dislokasi). Menurut Laclau dislokasi merupakan subversi diskursus hegemonik oleh peristiwa-peristiwa yang tidak berhasil didomestifikasi, disimbolisasikan, atau diintegrasikan ke dalam diskursus. Pada akhirnya dislokasi-dislokasi menjadi fondasi bagi terbentuknya identitas-identitas politik baru (Laclau, 1990: 31-36). Dengan kata lain benturan dengan antagonisme pada dirinya merupakan jalan menuju suatu arah identifikasi identitas politik.

Baik *psyce* dan *dislocation*, dalam konteks ambisi untuk menunggalkan neo-fasisme, merupakan bingkai yang menjelaskan berbagai gejala artikulatif dari kelompok-kelompok yang resisten. Kita mengenal GAM, OPM, dan berbagai gerakan separatis lainnya serta gerakan Reformasi 1998, sebagai tipikal gerakan resisten. Kita juga

mengetahui penentangan dari kelompok Islam “garis keras” terhadap model pembinaan yang dilakukan oleh negara, misalnya penataran P4. Selain menjadi gejolak artikulatif, fakta di atas menjelaskan paradoks dari tindakan represi karena pada dirinya represi akan menghadirkan kembali subjek yang direpresi, *the return of repressed in politics*¹ (Sayyid, 1997: 3). Tentunya masih banyak gejolak lain yang muncul. Ini semua menunjukkan sejarah kita sebagai suatu bangsa dalam bingkai kenegaraan ini belum selesai. Kita senantiasa melangkah di atas alur kontingensi karena fakta pluralitas yang perlu diafirmasi dalam ruang politik ke-Indonesia-an. Perlu dipertegas, afirmasi terhadap fakta pluralitas seharusnya dilakukan dalam kerangka yang berbeda dan lebih radikal.

Di era demokrasi liberal saat ini seolah-olah ruang bagi kelompok minoritas, seperti misalnya gerakan keagamaan Ahmadiyah dan kelompok-kelompok minoritas lain—untuk mengekspresikan identitas kultural dan politiknya. Tetapi yang terjadi adalah kelompok minoritas gagal dalam mengartikulasi identitas kultural dan politiknya. Ambiguitas dalam mengisi ruang politik ini tidak hanya terjadi karena gerakan fundamentalisme politik tetapi juga karena hegemoni beroperasi dengan kuat. Secara implisit hal ini menjelaskan kelemahan politik liberal dalam menjawab problem pluralitas. Politik liberal dalam hal ini tidak bisa menjelaskan aspek hegemonik kekuatan politis tertentu, sehingga pluralitas menjadi diterjemahkan sebagai penjinakkan bahkan represi, bukan didasarkan pada pemahaman tentang kesetaraan.

Pluralitas sejatinya menunjukkan kompleksitas politik, sesuatu yang harus diterima dan dimaknai dalam ruang relasional. Karena itu pluralitas adalah *the battle field*. Relasi ini menitikberatkan pada kompleksitas dari suatu kemajemukan politis atau identitas politis yang saling berhubungan secara konfliktual tetapi tidak dalam tendensi distortif melainkan ke arah yang lebih positif (Isin, 2002: 283-284). Jadi model relasi ini bersifat artikulatif dari berbagai identitas yang kompleks dalam ruang sosial yang ada. Etnisitas Indonesia sebenarnya bisa dijelaskan dari perspektif ini.

1 Sayyid menjelaskan hal ini dengan menggunakan metafor Bolticelli dan Boltraffio, dimana keduanya berhasil mengembalikan Signorelli ke dalam ingatan sejarah Vienna. Signorelli sendiri merupakan metafor dari *the repressed thought of Fresco of Orvieto*.

Radikalisasi Pluralisme

Pada level konseptual pluralisme harus dilihat sebagai fondasi konstitutif bagi demokrasi modern. Oleh karena itu pluralisme penting untuk dikembangkan. Tetapi, penting untuk ditegaskan bahwa model pluralisme ekstrim dan liberal pluralisme justru bisa menjadi potensi yang melemahkan pluralisme itu sendiri. Pluralisme ekstrim menitikberatkan pada kebebasan yang tanpa batas dan mengabaikan bentuk subordinasi yang terjadi di dalamnya. Begitu pula liberal pluralisme, menghilangkan dimensi konflik dalam pengelolaan pluralisme. Ditarik dari garis penjelasan sebelumnya, kita dapat mengatakan bahwa pluralisme seharusnya adalah pluralisme yang di dalamnya mengandung kepelbagaian kepentingan yang dapat didorong untuk membentuk suatu perjuangan hegemonik tatkala relasi kekuasaan bersifat subordinasi atau represif. Sebagai konsekuensinya pluralisme harus memiliki dimensi antagonis sehingga bersifat politik (Mouffe, 2000: 20). Di sinilah ditemukan tapal batas antara pluralisme liberal, pluralisme ekstrim dengan pluralisme agonistik. Tapal batas ini merupakan cerminan ontologis dalam memandang politik khususnya demokrasi. Cerminan ontologis yang dimaksud adalah proses mendasar terbentuknya masyarakat. Ontologi agonistik menekankan pada relasi kepolitikan (*political*) dari berbagai identitas dalam masyarakat. *Political* merujuk pada dimensi antagonisme yang mana bersifat konstitutif terhadap relasi dalam masyarakat.

Antagonisme menunjukkan betapa beragamnya identitas dalam ruang politik. Sehingga menjadi kondisi yang niscaya bagi kita untuk menjelaskan pluralisme dalam konteks ini. Dengan kata lain pluralisme harus dijelaskan dalam kaitannya dengan kepelbagaian identitas.

Identitas dipahami sebagai sesuatu yang dibentuk oleh proses identifikasi dalam sistem yang bersifat terbuka.² Identitas tidak dapat lepas dari sifat konstitutif dari berbagai diskursus yang menentukan posisi subjeknya dalam arena sosial. Berbagai bentuk identifikasi menggambarkan kepelbagaian identitas sehingga berdampak pada sifat identitas yang tidak pernah terfiksasi. Hal ini disebabkan oleh karakter relasional dari berbagai identitas karena setiap identitas tidak pernah

2 Hal ini mencirikan nalar posmodernisme yang mana meyakini bahwa tidak ada identitas yang final karena identitas senantiasa berada dalam sistem yang terbuka (Hargens, 2006: 42).

berada dalam suatu ruang tertutup melainkan bersifat eksternal (tidak secara total) dalam internalitasnya yang tidak total. Relasi berbagai identitas menyebabkan identitas selalu rentan dan berada pada jalur yang terus menerus berubah bentuknya karena medan diskursivitas yang diisi oleh berbagai diskursus yang terus-menerus terkonstruksi (Mouffe, 1992: 28). Apa yang dijelaskan di sini mengenai identitas adalah *pertama*, bahwa identitas itu tidak pernah bersifat esensial atau bersifat alamiah. *Kedua*, identitas selalu bersifat subversif, artinya setiap usaha fiksasi dari identitas akan berbenturan dengan kehadiran yang kontingen. Hal tersebut menjadi sebab bergeraknya setiap setiap perubahan substansial identitas di atas lintasan sejarah. *Ketiga*, identitas berada dalam medan *overdeterminasi*. *Overdeterminasi* diadopsi dari pemikiran Althusser dengan interpretasi demokratis oleh Mouffe. *Overdeterminasi* sendiri merupakan istilah Psikoanalisis dan linguistik yang dipakai oleh Althusser yang melampaui makna metaforisnya. Dalam pemikiran Freud, *overdeterminasi* bukanlah proses fusi yang biasa melainkan suatu tipe fusi khusus yang mengandung dimensi simbolik dan pluralitas makna. Sehingga apa yang dikatakan Althusser bahwa ranah sosial itu bersifat *overdeterministik* berarti ranah sosial tercipta sebagai suatu tatanan simbolik. Ranah simbolik ini menunjukkan ketiadaan arti esensial yang harafiah dari setiap relasi sosial. Masyarakat dan agen sosial tak punya esensi apapun dan keteraturan mereka sebagai identitas hanya ada dalam makna fiksasi yang relatif dan rapuh. Atau dengan kata lain identitas dalam medan *overdeterminasi* merupakan identitas yang tak pernah dibentuk secara final (Laclau, 1985: 97-104).

Ketidaktuntasan tersebut menjelaskan juga proses identifikasi yang menentukan setiap pembentuk identitas. Dalam kaitannya dengan ini, proses identifikasi merupakan bagian dari tindakan performatif dari setiap identitas. Butler menjelaskan bahwa tindak performatif merupakan pembentukan identitas melalui proses *Stylized repetition of acts* (Butler, 1988: 1). Tindakan repetisi ini tentunya bergerak dalam medan diskursif tertentu yang menentukan keragaman itu sendiri.

Identifikasi mendorong orang mengkonstruksi siapa kita dan siapa mereka. Relasi kita dan mereka merupakan relasi yang krusial dalam mendorong pembangunan masyarakat demokrasi. Jika dalam demokrasi liberal keberagaman identitas ingin diolah dalam harmonisasi

atau sifat toleransi maka dalam pemikiran radikal, relasi antara identitas harus diletakan pada dimensi konflikktual yang tidak dapat dihilangkan. Sehingga secara ontologis pemikiran demokrasi radikal mengakui bahwa demokrasi merupakan ruang konflikktual dari berbagai antagonisme yang sifatnya konstitutif. Dalam pemikiran Isin, dimensi *political* harus dimaknai dalam relasi ruang *battle field*-relasi yang menitik beratkan pada kompleksitas dari suatu kemajemukan politis atau identitas politis yang saling berhubungan secara konflikktual tetapi tidak dalam tendensi distortif melainkan ke arah yang lebih positif.

Relasi antagonisme ini tidaklah bersifat eliminatif atau *zero sum game*. Relasi ini harus dimaknai melalui gagasan *constitutive outside*. Terminologi Derrida ini merujuk pada fakta bahwa pembentukan identitas secara tidak langsung akan membentuk identitas lainnya yang disebut *difference* sehingga sifat identitas adalah relasional. Dalam konteks identitas kolektif, kita akan selalu berurusan dengan pembentukan "kita" yang hanya akan eksis dalam relasinya dengan "mereka". Makna *constitutive outside* ini harus ditarik lagi ke dalam pemaknaan *the others* atau liyan sebagai *legitimate dissent*. *Legitimate dissent* adalah transformasi dari relasi antagonistik ke arah agonistik. Relasi agonistik tidak melihat *the other* sebagai musuh yang harus dihilangkan tetapi sebagai *adversary* yang memiliki legitimasi dalam univesum demokratik. Relasi *adversarial* atau agonistik memungkinkan terciptanya *channel* politik bagi berbagai identitas untuk mengartikulasikan hak-hak mereka dalam proses relasi demokratis.

Ide di atas membawa kita pada suatu refleksi baru ide pluralisme agonistik. Model relasi *adversarial* selain menjelaskan relasi demokratik dari berbagai identitas, juga memungkinkan kita untuk menjelaskan pentingnya politik pengakuan. Politik pengakuan adalah gerak identitas untuk meruntuhkan subordinasi dalam wacana-wacana kultural tertentu serta perjuangan untuk menempati posisi yang setara dalam ranah sosial. Dalam konteks ini liyan tidak lagi dibingkai dalam cara pandang "honor" tetapi justru harus dilihat yang dalam bahasa *dignity* (Gutman, 1994). "Honor" adalah refleksi nyata dari struktur masyarakat hirarkis sedangkan *dignity* adalah bahasa politik yang menjelaskan posisi egalitarian.

Lebih jauh pluralisme yang perlu kita artikulasikan adalah pluralisme yang didasarkan pada kepelbagian identitas dengan landasan

pada imaji tentang *equality* dan kebebasan sebagai *ethico politic*, untuk mengartikulasikan berbagai hak yang dimiliki. Prinsip kebebasan dan persamaan menjadi salah satu fundasi penting untuk menjelaskan kepelbagaian identitas atau pluralisme itu sendiri. Prinsip ini menjadi kunci bagi praktik demokrasi dari setiap identitas politik. Dalam bahasa Wittgenstein, *equality* dan *liberty* berperan sebagai "*grammar of conduct*", yakni suatu yang menjadi landasan bagi setiap aktus politik.

Merayakan kebebasan adalah suatu usaha untuk membuka ruang bagi artikulasi dan ekspresi politik berbagai identitas politik. Konsekuensi logis dari semua ini adalah terbentuknya format politik yang egalitarian antara berbagai identitas. Dari sanalah makna kesetaraan hadir sebagai penjelas dalam pluralisme.

Namun kesetaraan yang dipikirkan dalam pluralitas tersebut berada dalam relasi kepolitikan atau konflikktual seperti yang dijelaskan sebelumnya. Relasi konflikktual tersebut harusnya didasari oleh etika kepolitikan sehingga konflik memiliki nilai konstruktif bagi perkembangan demokrasi.

Semangat egalitarian yang tercermin dalam etika kepolitikan menjadi alasan bagi setiap aktus politik untuk menentang keberadaan rezim yang opresif dewasa ini. Kita dapat merujuk pada penjelasan Mouffe yang mengatakan bahwa

radical democratic interpretation of the *political* principles emphasizes the numerous social relations where subordination exists and must be challenged if the principles of *equality* and *liberty* are to apply (Mouffe, 1992: 24).

Interpretasi demokrasi radikal terhadap prinsip kepolitikan menekankan penentangan terhadap relasi subordinasi jika ingin menerapkan prinsip kesetaraan dan kebebasan.

Dengan kata lain, pluralisme yang berdasar pada etika kepolitikan sesungguhnya menggemahkan perjuangan melawan rezim-rezim yang di dalamnya bekerja logika subordinasi dalam setiap relasi politik yang terbentuk.

Penegasan *equality* dan kebebasan pada identitas-identitas politik menjadi penanda yang berbeda dengan konsepsi Liberal yang mereduksi *equality* hanya pada persoalan hak individu. Wacana Agonistik menjadi penjelas yang berciri posindividualistik yang mana *equality* tidak direduksi

hanya pada hak yang menjadi milik personal melainkan menempatkan *equality* sebagai dasar bagi solidaritas antara kelompok-kelompok atau identitas kolektif yang jamak (Mouffe, 1988: 103).³

Multikulturalisme dan kewarganegaraan dalam pluralisme

Pluralisme bagaimanapun tidak lepas dari wacana multikulturalisme karena dasar dari politik multikulturalisme adalah pluralitas identitas. Pluralitas identitas ini menjadi fakta sosial juga fakta politik. Dalam kaitannya dengan fakta politik, Kymlicka menjelaskan multikulturalisme sebagai suplemen bagi kewarganegaraan (2001: 153). Disini Kymlicka mencoba menarik garis pembatas yang tegas antara multikultural dan kewarganegaraan (*citizenship*). Konsekuensinya, multikulturalisme hanya menjadi gagasan eksternal bagi ide kewargaan. Untuk mengkritisi ide Kymlicka, kita dapat mengajukan pertanyaan sebagai berikut, bagaimana mungkin kita menempatkan posisi suplemen terhadap ide multikultural di dalam wacana kewarganegaraan yang mengandung makna pluralitas artikulasi dari berbagai identitas? Jika ide multikultural menjelaskan penghormatan terhadap perbedaan politik, sosial, dan budaya dari setiap kemajemukan identitas maka kewarganegaraan menjelaskan identitas-identitas yang aktif mengartikulasikan berbagai tuntutan-tuntutan demokratiknya. Jadi dari kedua definisi di atas, tidak mungkin kita dapat menarik garis pembatas yang tegas antara multikultural dan kewarganegaraan karena sifatnya yang konstitutif. Implikasi relasi konstitutif adalah memungkinkan kita untuk menjelaskan radikalisasi relasi artikulasi warga negara dalam ide multikulturalisme karena tidak adanya batasan-batasan yang spesifik dan tegas.

Apabila dibawa dalam realitas ke-Indonesia-an saat ini, multikulturalisme dan identitas politik di Indonesia sudah seharusnya dibaca secara lebih radikal. Kasus Ahmadiyah, terorisme, sampai pada ekspresi politik Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan beragama dan berkeyakinan (AKKBB) adalah beberapa dari sebagian besar geliat kemajemukan bangsa. Kita menyaksikan penolakan terhadap Ahmadiyah sebagai identitas religius yang dianggap menyimpang dan memperlakukan mereka sebagai kelompok yang harus dieliminasi. Hal ini dipertegas oleh dikeluarkannya Keputusan Bersama Menteri Agama,

3 Dengan cara pikir seperti inilah hegemoni dapat dijelaskan.

Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2008. Dalam diktum kedua dijelaskan bahwa, “*Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.*”

Pada momen ini penulis tidak sedang masuk dalam pemaknaan keagamaan (dari sisi keimanan) tetapi melihat bekerjanya logika pemerintah dalam mendefinisikan identitas keagamaan. Peristiwa ini dilihat sebagai pertarungan antagonistik, antara identitas Islam yang benar dan identitas Islam yang dianggap menyimpang. Hal ini dicirikan oleh, pertama, sifat eliminatif dari kebijakan pemerintah. Ini disebabkan oleh pemaknaan identitas yang ajeg. Ajeg dalam arti, melihat produksi dan posisi subjek agama sebagai identitas yang tidak berubah di dalam dirinya. Hal ini berdampak munculnya pandangan bahwa pergeseran pemaknaan yang mendorong identifikasi terhadap identitas tertentu dianggap sebagai penyimpangan. Kedua, penggunaan kategori dogmatik yang mengandung definisi benar dan salah -*good and evil*- untuk merepresi artikulasi politik keagamaan tertentu. Dalam momen inilah logika penundukkan mengkonstitusi identitas, *that one identity can only be validated or worse constituted by suppression of another* (Dryzek, 2005: 219).

Dalam kasus lain, misalnya penanganan terorisme di Indonesia, penggunaan kategori humanistik menjelaskan dimensi moralistik yang monolitik dari wacana liberal di mana secara sewenang-wenang mendefinisikan siapa yang disebut *Civilized World* dan siapa yang disebut *Enemies of Freedom*, atau apa yang dianggap *good* dan apa yang dianggap *evil*. Hal ini pada akhirnya menutup ruang artikulatif dari identitas-identitas yang tersubordinasi. Gejolak artikulatif ini di sini tidak diolah dalam mekanisme demokrasi yang radikal melainkan melalui mekanisme *majority rules* yang dijustifikasi dalam model pengolahan politik liberal.

Kita juga dihadapi oleh aksi kekerasan dalam konflik antara berbagai identitas. Misalnya kasus penganiayaan terhadap AKKBB. Kekerasan itu hadir sebagai konflik yang tidak dapat ditransformasi (Galtung, 2007). Ketidakmampuan mentransformasi konflik adalah

cerminan dari logika identitas yang berada dalam sistem yang tertutup. Sehingga untuk menghindari kekerasan itu kita harus melakukan transformasi, yakni dengan jalan meradikalisasi model relasi dalam pluralitas yang ada. Meradikalisasi model relasi politik menjadi usaha penting bagi kita untuk memberi kerangka bagi setiap aktus politik atau artikulasi politik warga negara.

Jika kita ingin melangkah dalam radikalisasi pluralisme maka kita harus melihat perbedaan dalam bingkai *legitimate dissent*. Secara logis hal itu memunculkan kesadaran koeksistensial di mana kita saling menyadari bahwa kita sebagai kita yang “ada” terbentuk karena mereka sebagai mereka yang “ada” juga terbentuk. Di sinilah eksistensi selalu hadir dalam model *constitutive outside*. Model berpikir ini menjadi kerangka relasi agonistik yang telah dijelaskan sebelumnya. Sehingga yang menjadi penegasan kita di sini adalah terbentuknya relasi antara kita dan mereka dalam mekanisme konfliktual yang agonistik.

Relasi agonistik yang bersifat konfliktual tentu tidak memperuncing partikularitas identitas. Dengan memaknai identitas dalam suatu sistem yang terbuka maka partikularitas ini dapat bergerak melampaui kediriannya. Gerak politis ini akan mendasari suatu relasi positif yang disebut relasi hegemonik. Relasi hegemonik dalam pluralisme sangat penting khususnya dalam kaitan dengan perjuangan akan kesetaraan dan kebebasan atau perjuangan emansipasi dalam pluralisme. Perjuangan ini secara disebut Laclau sebagai perjuangan demokratik. Meneruskan hal ini, yang perlu kita jelaskan berikutnya memahami hegemoni sebagai bagian penting dari penjelasan mengenai pluralisme.

Hegemoni dan pluralisme

Pluralisme identitas dalam pemaknaan yang radikal bukanlah kemajemukan yang pasif. Mengkerangkai pluralisme seperti ini harus diikuti oleh penjelasan lain yakni kemajemukan yang dijelaskan oleh aktus-aktus politik dari berbagai identitas. Dalam konteks wacana agonistik kemajemukan ini bukanlah sesuatu yang merayakan partikularitas yang ekstrem melainkan terbentuk dalam suatu jalinan artikulatif. Dalam kaitannya dengan ini, Laclau dan Mouffe berpendapat bahwa hubungan artikulatif antar identitas politik harus terjadi sehingga memungkinkan terjadinya relasi hegemonik (Laclau dan Mouffe, 1985: x).

Bertumpu pada penjelasan di atas, konsep hegemonik tentunya menjelaskan relasi kuasa dalam tubuh berbagai identitas, di mana dalam pluralitas dan situasi konfliktual terjadi momen *decision* yang membentuk kekuatan bersama-hegemoni- demi mencapai pengakuan dan terbukanya akses-akses terhadap sumber daya (redistribusi) (Mouffe, 2000: 130; 2005: 12). Pada momen itulah makna radikalisme demokrasi muncul dalam wacana agonistik. Dalam wacana agonistik, radikalisme berarti usaha transformasi terhadap relasi kekuasaan yang ada dan membangun hegemoni demokratis (Mouffe, 2000: 52-53).

Hegemoni menjadi struktur pusat analisis politik. Dalam setiap bentuk hubungan politik selalu ada kemungkinan untuk menciptakan hegemoni sehingga setiap bentuk relasi sosial selalu menghadirkan hegemoni (Laclau dan Mouffe dalam Hargens, 2006: 61). Jika demikian kita bisa menyimpulkan di awal bahwa relasi Agonistik memiliki penjabar khusus bagi relasi hegemonik antara berbagai identitas.

Sebelum kita melangkah begitu jauh, perlu kiranya diawal kita memahami hegemoni dalam konteks geneologis. Hegemoni kadang menjadi *privilege* dari tradisi marxisme dan di sisi lain kita coba menariknya sebagai penjabar bagi relasi Agonistik. Oleh karena itu, menjadi wajar jika kita memulai pembahasan ini dengan mengajukan sebuah pertanyaan, "apakah hegemoni yang akan dijelaskan di sini mengandung retakan baru yang teramat dalam dengan tradisi marxisme?" Secara cepat, pertanyaan ini dapat dijawab dengan jawaban negasi, yakni tidak. Rujukan terhadap marxisme merupakan langkah yang perlu dilakukan walaupun kita sampai pada pergeseran tertentu. Pergeseran itu memunculkan suatu penanda baru dalam menjelaskan hegemoni yakni pos-marxisme. Untuk menjelaskan terminologi ini maka kita harus berangkat dari penjelasan Heidegger mengenai *destruction*.

Penggunaan terminologi *destruction* dalam pemaknaan Heidegger tidak berarti pengambilan jarak yang tegas dengan tradisi. Bagi dia, *destruction* tidak menandakan operasi negatif atau penegasian yang murni atau penolakan total terhadap tradisi tetapi menjadi sebuah langkah radikal untuk melampaui tradisi dengan meninggalkan kemungkinan untuk tetap menjalin beberapa simpul penjabar dengan tradisi yang ada. Dalam pengertian seperti ini, istilah postmarxisme sebagai *moment of destruction* terhadap marxisme bermakna melampaui fakta ontologis mengenai kelas modal, materialisme historis, dan lain-lain (Laclau, 1987: 331).

Penjelasan mengenai destrucution menjadi logika bagi kita untuk menjejaki konsepsi hegemoni dari tradisi marxisme sampai postmarxisme.⁴

Mengurai hegemoni dapat dimulai dari konsepsi Rosa Luxemburg, khususnya mengenai arti penting pemogokkan massal sebagai alat politik. Tema ini menjadi gambaran bagi pencapaian cita-cita sosialis yakni kesatuan kelas dan revolusi di Eropa. Bagi Rosa Luxemburg pemogokkan massal menandakan *spontanisme*⁵ dari suatu aktus politik di mana tidak ada gerakan dengan tuntutan parsial yang terus menerus megurung diri dalam batas-batas perjuangannya sendiri: secara tak terelakkan pemogokkan massal menjadi simbol resistensi yang memiliki efek meluas dalam bentuk-bentuk yang tidak dapat diramalkan sebelumnya.

Suatu yang penting di sini adalah pengakuan Rosa Luxemburg akan fragmentasi sosial dan relasi *overdeterminasi*. Bahwa fakta sosial merupakan polifoni dari berbagai identitas sehingga dimetaforkan sebagai kesatuan simbolik. Artinya melimpahnya penanda oleh petanda. Dengan demikian Luxemburg melihat kesatuan kelas sebagai kesatuan simbolik di mana kesatuan itu tidak mencirikan kelas sebagai identitas tunggal. Di sinilah logika hegemoni muncul dalam penjelasan Luxemburg karena pengakuan dan penegasannya pada pengalaman fragmentasi dan ketidakakuan artikulasi-artikulasi di antara perjuangan dan posisi-posisi perjuangan yang berbeda-beda (Laclau, 2001: 13).

Namun kita akan menemukan ambiguitas dari logika Rosa Luxemburg karena penegasannya pada keniscayaan historis, yakni keyakinan akan peran kapitalisme dalam menentukan sejarah proletarianisme. Penegasan ini menandakan tidak lepasnya diskursus Luxemburg dari kategori ekonomistik dalam struktur sosial (Laclau, 2001: 13). Luxemburg masih melihat determinasi keniscayaan historis bagi kesatuan kelas.

Namun demikian titik tekan pada metafora kesatuan simbolik menjadi langkah maju jika dibandingkan dengan pemikiran dalam

4 Hegemoni yang menjadi kerangka dasar penjelasan bagi strategi artikulasi warga negara adalah hegemoni dalam pemaknaan postmarxisme.

5 Gagasan Spontanisme Luxemburg merefleksikan bentuk khas perjuangan dominan revolusi Rusia yang menjadi penting untuk melihat masa depan perjuangan buruh di Jerman (Laclau *terj*, 2008: 3)

internasional II seperti Lenin. Dalam diskursus Leninis, hegemoni melibatkan kepemimpinan politik dalam aliansi kelas. Hegemoni yang tercermin dari gagasannya mengenai aliansi kelas yang masih menunjukkan sentrum gerakan pada kaum proletar. Proletarianisme menjadi identitas rujukan dari berbagai elemen di luarnya. Artinya berbagai identitas politik yang ada berada di bawah satu naungan kelas proletar membentuk aliansi untuk melawan musuh bersama. Proletarianisme memiliki isi spesifik dalam dirinya sebagai identitas politik. Isi lengkap ini hadir dalam relasi kontradiksi⁶ dirinya dengan borjuis serta kepentingan historis yang secara niscaya terdefenisikan. Hal ini menjadi gerak cerdas untuk menyelubungi yang sesungguhnya (*artifice of concealment*) atau bentuk niscaya dari suatu esensi (Laclau, 2008).

Namun gagasan hegemoni dalam tubuh marxisme sedikit mendapat pencerahan melalui gagasan Gramsci. Gramsci memperluas wilayah rekomposisi politik dan hegemoni serta bergerak melampaui kategori aliansi kelas Lenin. Kategori yang ditawarkannya adalah blok historis. Blok historis merujuk pada posisi-posisi subjek tertentu yang melintasi sektor kelas dan pada akhirnya membentuk suatu sintesis yang lebih tinggi, suatu kehendak kolektif dan melalui ideologi hal ini menjadi pengikat organik. Kategori blok historis merupakan kategori moral dan intelektual yang menentukan ikatan organik dari suatu praktik hegemoni. Yang baru di sini adalah kehadiran ideologi sebagai perwujudan konkret dari sistem relasional dan keseluruhan yang organik serta mewujudkan dalam institusi-institusi dan aparatus-aparatus yang mempersatukan suatu blok historis di seputar artikulasi dasar.

Pergeseran dalam pemikiran Gramsci mengantar kita pada titik krusial lain yakni lepasnya kategori keniscayaan. Bagi Gramsci subjek-subjek politik bukanlah kelas-kelas namun merupakan kehendak kolektif yang kompleks. Selain itu elemen-elemen ideologis yang diartikulasikan oleh suatu kelas hegemonik tak secara niscaya menjadi milik kelas tertentu (Laclau, 2008: 98). Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kehendak kolektif merupakan suatu hasil dari artikulasi politik-ideologis dari kekuatan-kekawatan historis yang terpencar-pencar dan

6 Relasi kontradiksi kita pahami sebagai relasi di mana antara identitas mendapat kepenuhan maknanya atau dengan kata lain A itu sepenuhnya A sehingga menjadi bukan A (Laclau *terj*, 2008: 187).

terfragmentasi. Poin ini menjadi penting karena menjadi landasan bagi strategi hegemonik dari kepelbagaian identitas dalam posisi-posisi subjek yang plural.

Gramsci memang telah menenun dimensi demokratik dari suatu praktik hegemoni namun ketidakkonsistennya muncul saat dia masih meyakini kelas buruh sebagai inti artikulatoris dari suatu blok historis (Laclau, 2001: 76). Namun kita tinggalkan ambiguitas Gramsci dan kembali pada spirit demokratik dari pemikiran hegemonik yang telah diuraikan Gramsci.

Hegemoni memiliki dua karakter utama, yakni otoritarian dan demokratik. Karakter otoritarian muncul dalam kondisi seperti pendefinisian secara apriori terhadap identitas kelas dan meyakini gerak sejarah secara *scientifik*. Perwujudannya ada dalam model aliansi kelas Lenin di mana watak determinasi kelas buruh dalam gerak sejarah menuju sosialisme menjadi penjelas utama bagi hegemoni. Dimensi eskatologis tersebut sebagai bahasa keselamatan memosisikan kelas buruh sebagai agen yang diasumsikan membawa perubahan bagi sejarah. Asumsi dasar inilah yang melahirkan watak otoritarian dalam konsep hegemoni marxisme.

Tentu kita harus melepas kategori otoritarian di atas dan saatnya kita merayakan watak demokratik dari konsepsi hegemonik. Watak demokratik ditandai oleh *pertama*, runtuhnya batas tegas pendefinisian identitas sehingga sifat kontigensi menjadi cara berada dari identitas politik. Seperti yang dikemukakan oleh Mouffe, dua penjelas sentral dari hegemoni adalah kontingensi dan karakter konstitutif (Mouffe, 2005: 17). Sifat kontingensi memungkinkan relasi antara berbagai identitas tidak ditentukan secara apriori sehingga dapat melangkah melampaui partikularitas yang dimiliki. Dalam kondisi seperti itu artikulasi politik dari berbagai identitas dapat menjadi suatu polar hegemonik tertentu. Oleh karena itu, sifat hegemonik selalu konstitutif bagi suatu gerakan politik.

Kedua, dimensi konstitutif⁷ dipahami dalam logika terbentuknya identitas baru dari suatu praktik hegemonik. Relasi hegemonik dalam artian demokratik melepas segala bentuk isi identitas yang terbentuk karena suatu keniscayaan esensialis. Di sini kita bergeser lebih jauh karena dalam jalur kontingensi praktek hegemoni membuka ruang bagi terbentuknya kultur baru yang terbentuk dari relasi konstitutif antara berbagai identitas. Laclau mengemukakan bahwa:

Hegemony is not a type of articulation limited to the field of politics in its narrow sense but it *involves* the construction of a new culture – and that affects the levels where human beings shape their identity and their relations with the world (Laclau, 1990: 189).

Hegemoni bukanlah tipe artikulasi yang terbatas pada arena politik dalam maknanya yang sempit tetapi juga meliputi konstruksi budaya yang baru dan mempengaruhi manusia pada tataran pembentukan identitas serta relasinya dengan lingkungan atau dunia.

Pembentukan identitas baru selain dibaca sebagai sifat konstitutif dari suatu relasi juga dapat dilihat sebagai ciri dislokatif suatu praktik hegemonik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, berbicara soal dislokasi berarti berbicara soal fondasi di mana perubahan politik dimungkinkan dan identitas-identitas baru terbentuk.

Namun, bagaimana perjuangan atau artikulasi dari berbagai identitas secara jelas dikerangkai dalam relasi hegemonik?

7 Dimensi konstitutif juga penting untuk memahami *the Real* dalam tubuh sosial. *The Real* merupakan kondisi di mana kepelbagaian berada dalam situasi konfliktual yang tidak dapat direkonsiliasi melalui kalkulasi rasional semata. Menyadari hal itu, hadirnya *the Real* dalam tubuh sosial menggugah kita untuk memikirkan bagaimana sebenarnya membangun jalinan di atas fakta konfliktual tersebut? Mouffe di sini menjadikan elemen konstitutif sebagai penjelas. Bagi Mouffe *the Real* yang mewujudkan dalam antagonisme pada dasarnya bersifat konstitutif dari yang sosial (Mouffe, 2000: 139). Karena sifatnya yang konstitutif maka berbagai antagonisme pun dapat dikonversi menjadi kekuatan demokratik melalui relasi hegemoni.

1. Berbicara hegemoni dalam artikulasi berbagai identitas berarti memainkan suatu **strategi diskursif**⁸ tertentu (cf Laclau dan Mouffe *terj*, 2008: 90); strategi diskursif menjelaskan berbagai artikulasi dari berbagai elemen untuk mendefinisikan suatu posisi politik baru. Makna lain dari strategi diskursif adalah pluralitas yang diakomodasi karena diskursus tidak hadir dalam suatu ketunggalan elemen. Dengan demikian suatu praktik hegemonik berbicara soal *pluralitas yang distrukturkan dalam diskursus*. Oleh karena itu aktus hegemonik dalam pluralisme adalah jalinan relasi antara berbagai posisi subjek (baca: plural) yang memainkan diskursus tertentu untuk membangun suatu tatanan politik.
2. Hegemoni terjalin dalam suatu relasi equivalensi antara identitas. **Relasi equivalensi** dibangun melalui relasi identitas yang melampaui partikularitasnya. Relasi “melampui” ini kemudian dikondisikan oleh posisi kontekstual tertentu sehingga memungkinkan berbagai identitas menjalin relasi ekuivalensi. Situasi kontekstual yang mengkondisikan relasi ekuivalensi dapat berupa keadaan politik tertentu. Misalnya situasi opresif atau penindasan. Situasi inilah yang mendorong berbagai identitas menjalin relasi equivalensi atau kesamaan untuk menentang rezim opresif yang ada (Mouffe, 2008: 91). Dengan demikian, partikularitas tuntutan dari identitas-identitas yang plural dikosongkan makna partikularnya sehingga menjadi *empty signifier*. Seperti yang dijelaskan oleh Laclau bahwa, “*a signifier is emptied when it is disengaged from a particular signified and comes to symbolize a long chain of equivalent signifieds* (suatu penanda menjadi kosong ketika penanda itu berubah dari petanda partikular lalu menjadi simbol dari rantai petanda-petanda yang ekuivalen)” (Laclau, 1989: 81). Dalam konteks ini *empty signifier* muncul untuk memainkan fungsi universal karena jalinan-jalinan partikularitas berbagai identitas mengosongkan makna partikularnya dan membentuk penanda umum dalam kaitannya untuk menentang tatanan opresif. Oleh karena itu *Empty signifier* merupakan

8 Relasi penindasan atau opresif dibedakan dengan relasi subordinasi. Jika subordinasi menandakan penundukkan satu pihak terhadap keputusan pihak lain, maka relasi opresif berbicara soal relasi subordinasi yang melahirkan antagonisme. Munculnya antagonisme ini tidak hanya ada karena praktik represif dalam relasi kekuasaan namun juga dikondisikan oleh eksterior diskursif yang berperan untuk menggugah kesadaran akan posisi diopresi. Eksterior diskursif ini misalnya demokrasi (Mouffe dan Laclau, 2001: 153-154)

kondisi yang memungkinkan bagi relasi hegemoni dalam pluralisme (*empty signifiers is the very condition of hegemony*) (Laclau, 1996: 43).

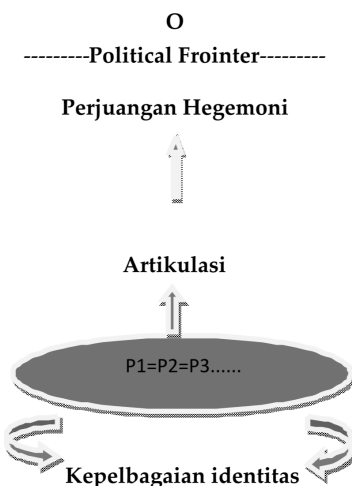
3. Hegemoni bertujuan untuk menstabilisasi *nodal point*. Artinya stabilisasi *nodal point* yang membentuk dasar tatanan konkret dengan mengartikulasi berbagai elemen yang ada-*floating signifier*.⁹ Bagaimana elemen yang berbeda ini menjadi *nodal point* atau elemen yang terstruktur? Elemen-elemen mengambang ini haruslah membentuk *empty signifier* karena *nodal point* merupakan *empty signifier* yang dapat menciptakan makna tetap terhadap berbagai penanda mengambang dengan mengartikulasikan mereka dalam sebuah rangkaian kesamaan atau *chain of equivalence*. Jika berbagai identitas ingin membangun suatu tatanan hegemonik maka setiap identitas yang berbeda harus terjalin dalam rangkaian kesamaan dan membentuk *point rujukan (nodal point)* dari gerakan mereka. *Point rujukan* ini tentunya disesuaikan oleh fakta politis yang dihadapi bersama oleh berbagai identitas.
4. Relasi hegemoni menggaris area **tapal batas politik** (*political frontier*) karena adanya polarisasi baru. Polarisasi ini didasari oleh relasi ekuivalensi karena membangun relasi ekuivalensi berarti menciptakan tapal batas dan mendefinisikan siapa yang menjadi lawan (*adversary*). Laclau dan Mouffe menegaskan hal ini sebagai berikut, "*if one is to build a chain of equivalences among democratic struggles, one needs to establish a frontier and define an adversary, but this is not enough. One also needs to know for what one is fighting, what kind of society one wants to establish*" (Laclau dan Mouffe, 2001: xix). Dari penjelasan di atas sesungguhnya bukan saja tapal batas yang harus dipikirkan, melainkan juga tujuan dari gerakan hegemoni. Tujuan itu dalam konteks demokrasi merupakan usaha transformasi terhadap tatanan yang opresif.

Tapal batas selain dijelaskan oleh relasi ekuivalensi juga merupakan fakta dari relasi hegemonik yang terbentuk oleh antagonisme. Antagonisme memainkan peran penting dalam pembentukan identitas dan hegemoni, karena penciptaan suatu antagonisme sosial meliputi penciptaan lawan yang akan menjadi sesuatu yang penting bagi terbentuknya *political*

9 *Floating signifier* atau penanda mengambang merupakan elemen-elemen ambigu yang disebabkan oleh pluralitas pemaknaan dalam ranah diskursif. Kita menyebut berbagai identitas warga negara sebagai *floating signifiers* karena posisi subjek yang plural dan merayakan makna yang berbeda dalam posisi diskursifnya.

frointer yang dikotomik (Hutagalung dalam Laclau dan Mouffe *terj*, 2008: xxxix-xl). Jaringan relasi antara posisi diskursif tertentu dari berbagai identitas megartikulasikan tuntutan demokratiknya pada saat yang sama menciptakan tapal batas dengan rezim yang sedang dilawan. Di sinilah proses identifikasi berlangsung secara internal dan eksternal artinya pada momen yang sama ada identitas kolektif yang terbentuk (internal) dari beragam identitas bersamaan dengan pengidentifikasian terhadap “yang lain” (eksternal) dari yang sudah terbentuk. Relasi ini tidak memungkinkan pembentukan identitas yang final karena antagonisme berada dalam ruang logika kontestasi yang terus menerus bergeser. Relasi hegemonik dari suatu rangkaian jaringan kesamaan antara berbagai identitas bagi saya dapat pula dijelaskan dalam logika Agonistik. Refleksi kita berangkat dari kesadaran akan adanya relasi konfliktual antara berbagai antagonisme yang muncul. Antagonisme ini menunjukkan pluralitas dari berbagai kepentingan politik. Dalam pluralitas itu selalu ada kondisi khusus yang mengantar berbagai identitas menjalin relasi di antara mereka. Kondisi itu sebelumnya kita sebut *chain of equivalence*. Namun rantai kesamaan ini tidak meluluh didasarkan pada situasi kontekstual tertentu melainkan dapat terbentuk karena adanya kesadaran akan identitas yang terbentuk dalam logika *adversarial*. Yang menjadi “yang lain” dalam relasi antara satu identitas dengan identitas lain selalu dipandang sebagai *legitimate dissent*. Posisi inilah yang memungkinkan relasi berbeda itu bisa disolidkan dalam suatu kerangka hegemonik karena adanya apresiasi terhadap “yang lain” dari suatu fakta plural.

Berikut adalah bagan yang menjelaskan secara singkat mengenai hubungan hegemoni dengan pluralitas identitas



O= rezim opresif yang menyubordinasi

H= kekuatan hegemonik

P1-P3 = identitas-identitas politik yang equivalen (pluralisme)

O merupakan rezim opresif yang sifatnya subordinatif. Antara kekuatan hegemonik (H) dan O dibatasi oleh garis atau *political frontier*. H dibentuk oleh kekuatan-kekuatan identitas politik yang beragam atau plural yang memiliki posisi diskursif tertentu yang terjaring dalam relasi *chain of equivalency*. Mereka merupakan partikularitas-partikularitas yang membentuk perjuangan bersama untuk menentang rezim opresif. *Chain of equivalensi* ini merupakan perjuangan artikulatif yang pada akhirnya membentuk *nodal point* yang akan mendislokasi hegemoni yang represif. Kondisi hegemoni juga dimungkinkan oleh adanya *empty signifier-the presence of empty signifier is the very condition of hegemoni* (Laclau, 1996: 43).

Relasi hegemonik merujuk pada ketidakpenuhan penanda partikular atau dengan kata lain setiap penanda partikular hadir dalam relasinya dengan penanda partikular yang lain (identitas yang lain), *the absent of fullness*. Melalui perjuangan hegemoni tentu kita dapat memaknai pluralisme identitas sebagai bagian penting dari perjuangan untuk kebebasan dan persamaan (Mouffe, 1993: 18-19). Pemaknaan terhadap pluralisme seharusnya tidak mengorbankan salah satu antara *equality* dan *freedom*.

Berbeda halnya dengan wacana pluralisme liberal seperti Isaiah Berlin (1981) yang memproblematisasi konflik antara kesetaraan dan

kebebasan dalam menerapkan pluralisme. Bagi dia pilihan *trade off* merupakan bentuk logis dari konflik *competing goods*. Berikut penalaran Berlin terhadap persoalan tersebut, “*Equality may demand the restraint of the freedom of those who wish to dominate; liberty . . . may have to be curtailed in order to make room for social welfare, to feed the hungry, to clothe the naked, to shelter the homeless, to leave room for the liberty of others, to allow justice or fairness to be exercised*” (Berlin, 1991a: 12–13).

Contoh berikut setidaknya memberi gambaran secara jelas penjelasan Berlin di atas. Kasus ini terjadi di *State Colledge Area School District* di Pennsylvania pada tahun 1999. Sekolah tinggi ini mengeluarkan sebuah kebijakan *anti-harassment* untuk menjamin lingkungan belajar bagi setiap mahasiswa. Dalam kebijakan ini *harassment* didefinisikan seperti: pengusikan terhadap individu khususnya berkaitan dengan ras, orientasi seksual, dan asal kebangsaan. Kebijakan ini mendapat penentangan dari David Saxe. Bagi dia kebijakan seperti ini hanya menekankan pada *equality* dan mengabaikan kebebasan berpendapat dari mahasiswa-mahasiswa yang memiliki keyakinan agama tentang tindakan dosa yang terkandung di dalam orientasi seksual seperti homoseksual (Burtonwood, 2006: 48). Untuk mengatasi konflik ini Berlin memberi solusi yang bersifat *trade off* atau kompromi.

Solusi Berlin menjelaskan tidak adanya dimensi artikulatif yang hegemonik dalam perjuangan menuju *equality* dan *freedom*. Pertarungan antara berbagai identitas untuk mendefensikan *equality* dan *freedom* haruslah bersifat hegemonik bukan sebaliknya menekankan pada mekanisme *trade off* yang berwatak *zero sum*. Bagi Laclau dan Mouffe ketika kebebasan dan persamaan berada pada ruang interpretasi maka tidak akan mungkin hadir suatu keputusan politik yang bersifat inklusif, sehingga melangkah ke arah *equality* dan kebebasan bersifat artikulatif dan hegemonik (Mouffe, 1992: 30). Model *trade off* bagi saya memiliki tendensi inklusifitas dengan demikian bergerak ke arah represi dalam medan pluralisme.

Saat ini kita sulit menemukan kekuatan hegemonik yang memperjuangkan isu-isu redistribusi dan rekognisi di Indonesia. Mengapa? Ada dua jawaban yang bisa penulis berikan, *pertama*, skema gerakan identitas politik yang bersifat fragmentatif. Walaupun kita bisa menemukan gerakan seperti Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan

berkeyakinan (AKKBB) yang terdiri dari berbagai identitas seperti, NU, Kelompok Media massa, dan lain-lain, tetapi perlu disadari bahwa aliansi ini bersifat eksternal dari berbagai identitas. Gerakan semacam ini akan sulit menciptakan *nodal point*. Tetapi jika watak esensialis dari kelompok-kelompok yang bergabung bisa ditekan maka dapat dipastikan akan muncul perjuangan hegemonik yang dapat memberi ruang politik bagi pluralisme radikal. *Kedua*, kita cenderung berbicara pluralisme dalam kaitannya dengan toleransi atau dengan kata lain pluralisme justru dilihat sebagai ajang untuk berbicara soal toleransi. Mengapa kita tidak berbicara soal ketidakadilan di dalam ruang yang majemuk, sehingga kita dapat menyorot pada isu-isu redistribusi atau keadilan dalam perjuangan hegemonik dari berbagai identitas dan mengapa kita lebih berbicara soal toleransi bukan emansipasi atau *equality*?

Pada titik ini penulis bersepakat dengan Zizek yang mengemukakan bahwa jawabannya ada pada logika *culturalization of politic* yang dioperasikan oleh multikulturalisme liberal. Dalam cara pandang ini ketidakadilan ekonomi dan politik yang dialami oleh identitas-identitas tertindas dinaturalisasi ke dalam perbedaan kultural sehingga pendekatannya lebih menekankan pada aspek kebudayaan, misalnya berbicara soal pentingnya toleransi dan mengabaikan dimensi kepolitikan dari berbagai identitas (Zizek, 2008: 104). Bagaimana mungkin perjuangan hegemonik dari berbagai identitas muncul dalam nalar seperti ini?

Penutup

Indonesia dalam kompleksitas identitasnya tidak mungkin tidak harus melangkah menuju ruang demokrasi yang radikal. Walaupun kita memiliki otoritas untuk menentukan pilihan ontologis dan epistemologis, tetapi setidaknya skema politik Pos-Marxis memberi suatu pencerahan baru bagi laku politik negeri ini. Posisi penulis tegas pada basis politik yang sangat kontekstual bagi keilmuan politik kita sehingga dapat mengkerangkai gerakan-gerakan yang berwatak pluralisme. Para pemikir Post-Marxis seperti Laclau dan Mouffe menjadi pilihan masuk akal kita saat ini. Jika tidak demikian maka, penyatuan politik dengan jalan kekerasan masih akan mungkin terjadi. Kebijakan-kebijakan eliminatif pun akan sulit dihindari. *****

Daftar Pustaka

- Berlin, I. (1991). *The Crooked Timber of Humanity: Chapters in the History of Ideas*. London: Fontana.
- Burtonwood, Neil. (2006). *Cultural Diversity, Liberal Pluralism, and Schools*. London dan New York: Routledge.
- Butler, Judith. (1988). 'Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory.' *Theatre Journal*, Vol. 40, No. 4, pg. 519-531.
- Butler, Judith. (1997). *The Psychic Life of Power: Theories in Subjection*. Standford: Standford University Press.
- Galtung, John dan Charles Webel.(2007). *Handbook of Peace and Conflict Studies*. London dan New York: Routledge.
- Gutmann, Amy (ed). (1994). *Multiculturalism, Examining the Politics of recognition*. Princeton: Princeton University Press
- Hargens, Boni. (2006). *Demokrasi Radikal: Memahami Paradoks Demokrasi Modern dalam Perspektif Postmarxis-Posmodern Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe*. Jakarta: Parhesia
- Hutagalung, Daniel. (2008). 'Hegemoni dan Demokrasi Radikal-Plural: Membaca Laclau dan Mouffe.' Dalam Laclau dan Mouffe (terj). *Hegemoni dan Strategi Sosialis: Postmarxisme dan gerakan Sosial Baru*. Yogyakarta: Resist Book
- Isin, Engin F. (2002). *Being Political: genealogies of citizenship*. Minnesota: University of Minnesota.
- Kymlicka, W. (2001). *Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship*. New York: Oxford University Press Inc.

Laclau, Ernesto. (1996). *Emancipation*. London: Verso

Laclau, Ernesto dan Chantal Mouffe. (2001). *Hegemoni and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*. London: Verso.

Mouffe, Chantal. (1992). *Citizenship and Political Identity*. The MIT Press. Vol. 61. 28-32

Mouffe, Chantal. (1993). *The Return of Political*. London: Verso.

Mouffe, Chantal. (2000). *The democratic paradox*. London dan New York: Verso.

Mouffe, Chantal. (2005). *On The Political*. New York and London: Routledge.

Sayyid, Bobby. S. (1997). *Fundamental Fear*. London dan New York: Zed Book Ltd.

Tomagola, Tamrin Amal. (2006). *Republik Kapling*. Yogyakarta: Resist Book.

Zizek, Slavoj. (2008). *Violence*. New York: Picador.